DETERMINAN KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALIMANTAN

TESIS

Disampaikan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Ilmu Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

ADITYA PRADANA
NIM. B2052232008

PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	:	Aditya Pradana
NIM	:	B2052232008
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul proposal	:	Determinan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, Juli 2025



Aditya Pradana
NIM. B2052232008

PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

Nama	:	Aditya Pradana
NIM	:	B2052232008
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul proposal	:	Determinan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan

Menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, Juli 2025



Aditya Pradana
NIM. B2052232008

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Determinan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Di Kalimantan

Ini diajukan oleh :

Nama	:	Aditya Pradana
NIM	:	B2052232008
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Tanggal Ujian	:	30 Juli 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/Bln / Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Utama	Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A. NIP 19670707 199202 1 001	11/09 '2025	
Pembimbing Pendamping	Dr. H. Bustami, S.E., M.Si. NIP 19620612 198903 1 004	9/9 2025	
Ketua Penguji	Dr. Jumhur, S.E., M.Si. NIP 19670928 199702 1 001	04/09 2025	
Anggota Penguji	Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Sc. NIP 19760208 200501 2 002	03/09 2025	

Pontianak, 11 - 9 - 2025

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si.

NIP 19720607 199803 2 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang telah menyertai setiap langkah penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Tanpa limpahan kasih-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini. Semoga segala berkah yang diberikan-Nya senantiasa membawa manfaat, baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, serta mendapat ridha dan balasan dari-Nya.

Tesis ini berjudul "Determinan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan" merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari berbagai dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tanjungpura, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntaskan studi ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah banyak memberikan dukungan, baik secara akademik maupun administratif, untuk kelancaran studi penulis.
4. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan arahan dan dorongan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Prof. Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Bustami, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta arahan yang tulus dan ikhlas

sepanjang proses penulisan tesis ini. Bimbingan mereka telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik.

6. Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Sc., selaku Dosen Penguji I dan II, yang telah memberikan saran, kritik, dan arahan yang sangat konstruktif demi penyempurnaan dan perbaikan tesis ini.
7. Pengelola dan Staf Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan layanan administratif yang sangat membantu dalam setiap tahapan studi dan penyelesaian tesis ini.
8. Para dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani proses pembelajaran dalam program pascasarjana ini.
9. Bapak Alm. H. Solyan, BE dan Ibu Maria, selaku kedua orang tua penulis, serta Elva Devianti selaku Istri yang selalu memberikan doa, perhatian, motivasi, dan dukungan materiil yang tiada henti tanpa pamrih.
10. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi angkatan XXXII, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
11. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan selama pendidikan dan penyusunan tesis ini, hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, bantuan, dan kontribusi yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam hal penyajian materi maupun aspek teknis lainnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dan pengembangan karya ini di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi langkah awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

Pontianak, Juli 2025

Aditya Pradana
NIM. B2052232008

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALIMANTAN

Aditya Pradana
Email: b2052232008@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), *Good Corporate Governance* (GCG), *Net Interest Margin* (NIM), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return on Equity* (ROE) sebagai indikator kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Kalimantan selama 2015-2024. Menggunakan metode regresi data panel dan pendekatan *Common Effect Model*, hasil studi menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan, NIM berpengaruh positif signifikan, sementara GCG dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan kontribusi penjelasan sebesar 75,32 persen terhadap variasi ROE. Temuan ini menekankan pentingnya efisiensi intermediasi dan manajemen risiko kredit dalam meningkatkan profitabilitas BPD di wilayah Kalimantan.

Kata Kunci: ROE, NPL, GCG, NIM, CAR

DETERMINANTS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF REGIONAL DEVELOPMENT BANKS IN KALIMANTAN

Aditya Pradana
Email: b2052232008@student.untan.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the influence of Non-Performing Loans (NPLs), Good Corporate Governance (GCG), Net Interest Margin (NIM), and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Return on Equity (ROE) as an indicator of the financial performance of Regional Development Banks (BPD) in Kalimantan during 2015-2024. Using the panel data regression method and the Common Effect Model approach, the results showed that NPLs had a significant negative effect, NIM had a significant positive effect, while GCG and CAR had no significant effect on ROE. Simultaneously, these four variables had a significant effect with an explanatory contribution of 75.32 percent to the variation in ROE. These findings emphasize the importance of credit intermediation and risk management efficiency in increasing BPD profitability in the Kalimantan region.

Keywords: ROE, NPL, GCG, NIM, CAR

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALIMANTAN

RINGKASAN

1. Pendahuluan

Pembangunan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan maupun non-pemerintah. Salah satu pihak yang memiliki peran penting adalah perbankan, yang menjalankan fungsi dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti investasi, konsumsi, dan distribusi baik barang maupun jasa yang berkaitan erat dengan aspek keuangan (Sukarno & Nurviana, 2024). Sektor perbankan memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank tidak hanya menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang membutuhkan (*defisit*), tetapi juga menjadi penggerak utama dalam perputaran roda perekonomian nasional. Kinerja bank tidak semata-mata diukur dari volume penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan juga dari efisiensi operasional, tingkat profitabilitas, serta kualitas tata kelola yang dijalankan. Sejumlah indikator keuangan digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, antara lain *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), serta kualitas *Good Corporate Governance* (GCG). Kelima indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemampuan bank menjaga keberlanjutan bisnis dan ketahanannya terhadap risiko keuangan. Bank Pembangunan Daerah (BPD) memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui fungsi intermediasi keuangan, penyediaan layanan publik, serta penyaluran kredit produktif bagi sektor-sektor unggulan daerah. Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks, tekanan efisiensi operasional, dan tuntutan tata kelola yang transparan, pengukuran kinerja keuangan BPD menjadi isu yang krusial. Namun, di wilayah Kalimantan, BPD dihadapkan pada berbagai tantangan khas, antara lain rendahnya penetrasi pasar, struktur ekonomi daerah yang heterogen, serta dampak pandemi yang memengaruhi stabilitas keuangan dan kebutuhan akan penguatan tata kelola. Meskipun RGEC merupakan pendekatan standar dalam industri perbankan, penelitian empiris yang menguji pengaruh masing-masing komponen RGEC terhadap kinerja keuangan BPD secara terintegrasi dalam konteks Kalimantan masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman yang lebih dalam terhadap faktor-faktor determinan kinerja keuangan ini sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis bagi penguatan peran BPD dalam pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisi pengaruh NPL, GCG, NIM dan CAR terhadap ROE.

2. Metode Penelitian

Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data panel dari empat BPD di Kalimantan selama 2015–2024. Variabel yang dianalisis adalah ROE sebagai dependen, serta NPL, GCG, NIM, dan CAR sebagai independen. Model regresi data panel diuji dengan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*, serta menggunakan uji t, uji F, dan R^2 untuk mengukur pengaruh dan ketepatan model.

3. Hasil Penelitian

NPL terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kredit bermasalah, maka semakin rendah tingkat pengembalian modal bank. Temuan ini memperkuat teori risiko dan pengembalian bahwa kualitas aset produktif adalah penentu utama profitabilitas. Oleh karena itu, manajemen risiko kredit menjadi aspek vital dalam mempertahankan ROE.

GCG memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROE. Meskipun secara teoritis tata kelola yang baik mendukung efisiensi dan transparansi manajemen, namun dalam konteks BPD Kalimantan, implementasi GCG tampaknya masih bersifat administratif dan belum mampu memberikan dampak nyata terhadap kinerja profitabilitas bank.

NIM menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Ini menegaskan bahwa efisiensi intermediasi keuangan - khususnya kemampuan bank dalam memaksimalkan pendapatan bunga bersih terhadap aset produktif merupakan salah satu pendorong utama profitabilitas. Tingginya NIM mencerminkan posisi daya tawar bank dalam menetapkan suku bunga kredit dan kemampuan dalam mengelola biaya dana.

CAR justru menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Meskipun CAR tinggi menandakan kekuatan modal bank, namun hasil ini mengindikasikan adanya potensi overcapitalization yang tidak diiringi dengan efisiensi alokasi modal.

4. Kesimpulan dan Implikasi

Hasil menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, sedangkan GCG dan CAR tidak signifikan. Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap ROE. Disarankan agar BPD meningkatkan kualitas manajemen risiko, memperkuat implementasi GCG secara substansial, mengoptimalkan margin bunga bersih, dan memanfaatkan modal secara lebih efisien untuk mendorong profitabilitas yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TESIS ii
PENGESAHAN TESIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 17
1.2.1 Pernyataan Masalah 17
1.2.2 Pertanyaan Penelitian 18
1.3 Tujuan Penelitian 18
1.4 Kontribusi Penelitian 19
1.4.1 Kontribusi Teoritis 19
1.4.2 Kontribusi Praktis 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
2.1 Tinjauan Teoritis 20
2.1.1 Tingkat Kesehatan Bank dan Pendekatan *Risk-Based Bank Rating* 20
2.1.2 Teori Risiko dan Pengembalian (*Risk and Return Theory*) 21
2.1.3 *Net Performing Loan* terhadap *Return on Equity* 23
2.1.4 *Good Corporate Governance* terhadap *Return on Equity* 24
2.1.5 Net Interest Margin terhadap *Return on Equity* 25
2.1.6 *Capital Aquacy Ratio* terhadap *Return on Equity* 26
2.2 Kajian Empiris 27
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 34
2.3.1 Kerangka Konseptual 34
2.3.2 Hipotesis Penelitian 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 35
3.1 Bentuk Penelitian 35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 35

3.3 Jenis dan Sumber Data 35
3.4 Variabel Penelitian 36
3.5 Metode dan Alat Analisis 37
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 37
3.5.2 Regresi Linier Berganda 37
3.5.3 Estimasi Model..... 38
3.5.4 Uji Model 39
3.5.5 Pengujian Hipotesis..... 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Hasil Penelitian..... 41
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 41
4.1.2 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel 43
4.1.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda, Uji Statistik..... 45
4.1.4 Pengujian Hipotesis..... 48
4.2 Pembahasan 49
4.2.1 Pengaruh *NPL terhadap ROE* 49
4.2.2 Pengaruh GCG terhadap ROE 51
4.2.3 Pengaruh NIM terhadap ROE 53
4.2.4 Pengaruh CAR terhadap ROE..... 56

BAB V PENUTUP..... 59
5.1 Kesimpulan..... 59
5.2 Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN..... 71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel 36
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 41
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow..... 43
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman..... 44
Tabel 4.4 Uji Lagrange Multiplier 45
Tabel 4.5 Hasil Uji 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Return on Equity Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan Tahun 2015-2024 3
Gambar 1.2 Non Performing Loan Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan Tahun 2015-2024 6
Gambar 1.3 Good Corporate Governance (GCG) Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Kalimantan Tahun 2015-2024 9
Gambar 1.4 Net Interest Margin (NIM) Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan Tahun 2015-2024 12
Gambar 1.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan Tahun 2015-2024 15
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Olahan 71
Lampiran 2. Hasil Uji Chow 72
Lampiran 3. Hasil Uji Hausman 73
Lampiran 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier 74
Lampiran 5. Hasil Regresi Data Panel 75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan maupun non-pemerintah. Salah satu pihak yang memiliki peran penting adalah perbankan, yang menjalankan fungsi dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti investasi, konsumsi, dan distribusi baik barang maupun jasa yang berkaitan erat dengan aspek keuangan (Sukarno & Nurviana, 2024). Sektor perbankan memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank tidak hanya menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang membutuhkan (*defisit*), tetapi juga menjadi penggerak utama dalam perputaran roda perekonomian nasional. Beberapa ahli bahkan mengibaratkan bank sebagai "darah" atau "nyawa" dari sistem ekonomi karena perannya yang krusial dalam mendukung kegiatan produktif melalui penyaluran dana secara efisien (Ningsih & Ilhami, 2023).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dinamika ekonomi global dan domestik, fungsi strategis sektor perbankan menjadi semakin krusial. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memegang peran penting dalam mengarahkan dan mengawasi kinerja perbankan nasional agar tetap berada dalam kondisi yang sehat dan stabil (Anam, 2018). Dalam operasionalnya, bank menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai instrumen simpanan, lalu menyalurkannya dalam bentuk kredit dan pembiayaan lainnya. Efektivitas fungsi intermediasi ini sangat menentukan keberhasilan sistem keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja bank tidak semata-mata diukur dari volume penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan juga dari efisiensi operasional, tingkat profitabilitas, serta kualitas tata kelola yang dijalankan. Sejumlah indikator keuangan digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, antara lain *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), serta kualitas *Good Corporate Governance* (GCG). Kelima indikator ini

menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemampuan bank menjaga keberlanjutan bisnis dan ketahanannya terhadap risiko keuangan.

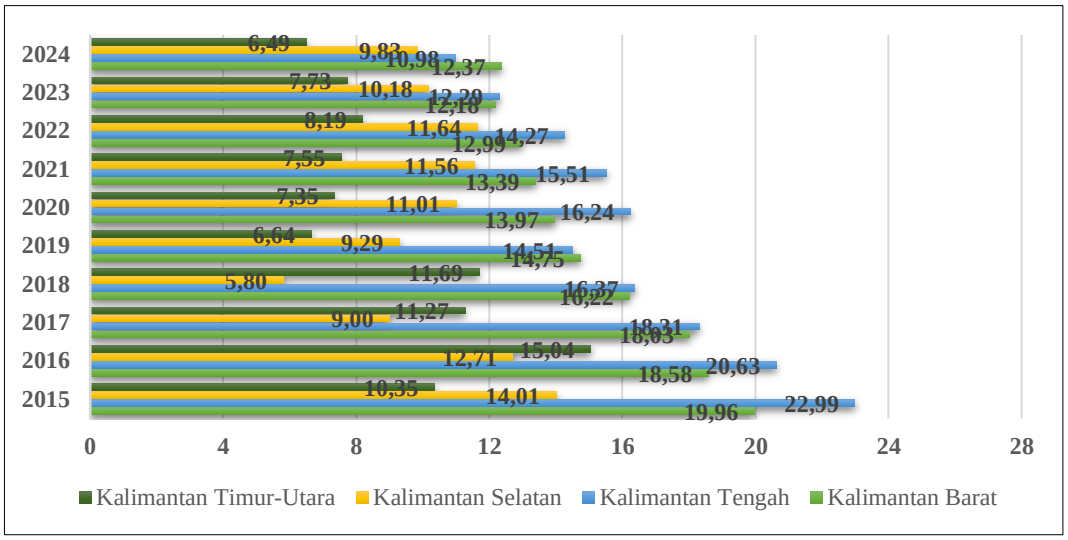
Di sisi lain, berkembangnya preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah turut mendorong kemunculan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Perkembangan ini mencerminkan tuntutan bagi sektor perbankan untuk tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi, tetapi juga terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat (Vivin & Wahono, 2017).

Pada konteks makroekonomi Indonesia, sektor perbankan memegang peranan dominan dalam sistem keuangan nasional. Hal ini terlihat dari besarnya porsi aset perbankan dibandingkan sektor keuangan lainnya, yang mencerminkan tingginya ketergantungan ekonomi nasional terhadap stabilitas sektor perbankan (Mustafa dkk., 2024). Oleh karena itu, stabilitas dan kesehatan perbankan menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Astanti dkk. (2024) menegaskan bahwa sektor perbankan Indonesia harus senantiasa menjaga kinerja dan tata kelola agar tetap mampu mendukung sistem ekonomi nasional secara optimal.

Dalam kerangka penilaian kinerja perbankan, ROE menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba atas modal yang dimiliki. ROE tidak hanya merefleksikan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya keuangan, tetapi juga menjadi ukuran penting dalam menilai daya saing dan keberlanjutan usaha perbankan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, ROE dipilih sebagai variabel dependen yang merepresentasikan kinerja keuangan bank. Analisis terhadap ROE dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai sejauh mana faktor-faktor internal bank, seperti efisiensi intermediasi, kualitas aset, kecukupan modal, dan tata kelola perusahaan, berkontribusi terhadap profitabilitas yang dicapai.

Berdasarkan Gambar 1.1, memperlihatkan tren ROE Bank Pembangunan Daerah (BPD) di wilayah Kalimantan mengalami penurunan yang cukup signifikan, ROE BPD Kalimantan Barat menurun dari 19,96 persen pada tahun 2015 menjadi 12,37 persen pada tahun 2024. BPD Kalimantan Tengah bahkan mengalami penurunan yang lebih tajam, dari 22,99 persen menjadi 10,98 persen

pada periode yang sama. BPD Kalimantan Selatan juga menunjukkan penurunan, dari 14,01 persen menjadi 9,83 persen. Sementara itu, BPD Kalimantan Timur dan Utara mencatatkan tingkat ROE terendah secara konsisten, dengan angka yang turun dari 10,35 persen pada tahun 2015 menjadi 6,49 persen pada tahun 2024.



Gambar 1.1 *Return on Equity* Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan Tahun 2015-2024

Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan struktural dalam pengelolaan profitabilitas di lingkungan BPD. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap tren tersebut antara lain peningkatan beban operasional, pertumbuhan kredit yang stagnan, serta kemungkinan memburuknya kualitas aset akibat meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL). Selain itu, meningkatnya ekuitas melalui penambahan modal tanpa diimbangi dengan pertumbuhan laba yang sepadan dapat menyebabkan terjadinya dilusi ROE.

Meskipun seluruh BPD di Kalimantan mengalami tekanan pada indikator ROE, terdapat variasi kinerja antarwilayah. BPD Kalimantan Barat, misalnya, cenderung menunjukkan penurunan yang lebih gradual dan tetap mampu mempertahankan kinerja yang relatif stabil dibandingkan BPD lainnya. Sebaliknya, BPD Kalimantan Tengah mengalami penurunan yang paling drastis, dengan ROE yang tereduksi lebih dari setengah dalam satu dekade terakhir. BPD Kalimantan Selatan sempat mencapai titik nadir pada tahun 2018 dengan ROE hanya sebesar 5,80 persen, sebelum menunjukkan sedikit perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Adapun BPD Kalimantan Timur dan Utara secara konsisten mencatatkan ROE di

bawah 10 persen, yang menunjukkan rendahnya efisiensi dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki.

Dalam konteks perbankan daerah, idealnya ROE berada dalam kisaran 15 hingga 20 persen. Dengan tidak adanya BPD di Kalimantan yang mampu mempertahankan ROE dalam kisaran tersebut sejak tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa secara agregat, kemampuan BPD di wilayah ini untuk menciptakan nilai tambah dari modal yang dimiliki mengalami tekanan yang cukup besar. Menurunnya ROE ini penting untuk menjadi perhatian, karena berimplikasi pada daya saing BPD, kapasitas pemberian kredit, dan kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi penyaluran kredit produktif, serta pengembangan sumber pendapatan berbasis jasa (*fee-based income*) guna memperkuat kinerja keuangan jangka panjang.

Penurunan ROE ini dapat menjadi indikasi adanya tekanan pada berbagai aspek operasional bank, seperti menurunnya margin bunga bersih (NIM), meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL), serta tingginya beban operasional. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari pihak manajemen untuk meningkatkan efisiensi kinerja, memperkuat tata kelola perusahaan (GCG), serta memperbaiki strategi alokasi aset dan pembiayaan.

Di sisi lain, pertumbuhan aset bank yang positif dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi indikator penting dalam menganalisis profitabilitas (Gozali dkk., 2023). Peningkatan aset tidak hanya mencerminkan ekspansi usaha, tetapi juga meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan. Seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah dan tingginya permintaan terhadap produk pembiayaan, aset bank berkembang secara signifikan, dan pada akhirnya berpotensi meningkatkan ROE melalui optimalisasi pemanfaatan (Bella & Suaryana, 2017). Namun demikian, ROE yang tinggi tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang stabil. Dalam beberapa kasus, tingkat ROE yang tinggi justru mengindikasikan peningkatan risiko, khususnya dalam hal likuiditas. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pembiayaan internal seperti laba ditahan dapat mengurangi fleksibilitas bank dalam menghadapi kebutuhan dana jangka pendek (Umah dkk., 2018).

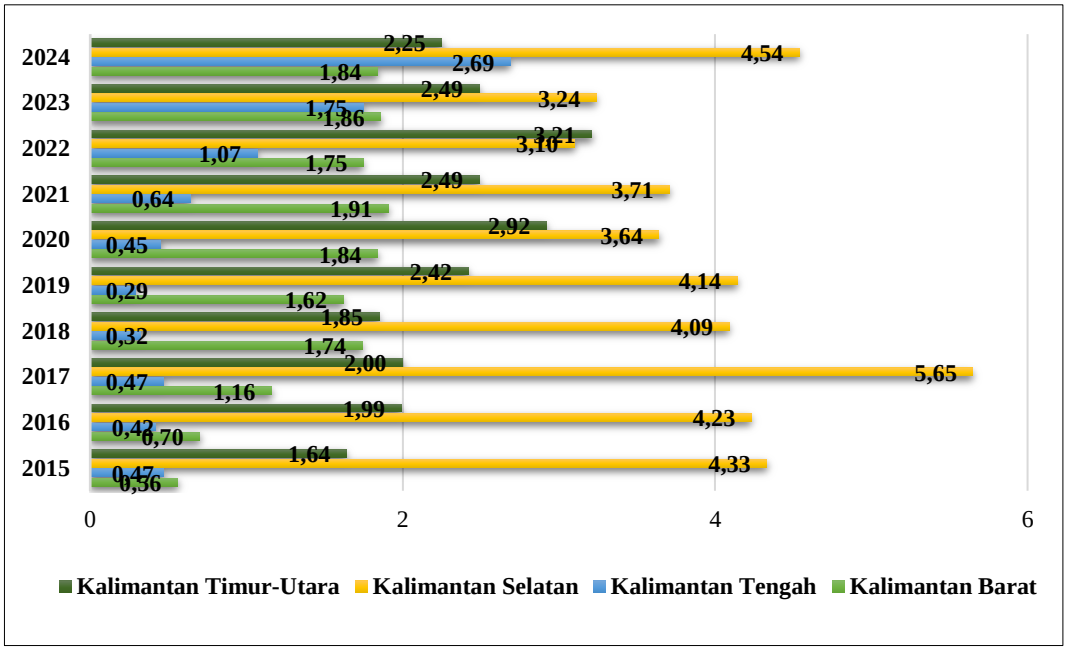
Oleh karena itu, meskipun ROE digunakan secara luas sebagai indikator utama dalam mengukur tingkat profitabilitas bank dan ditetapkan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, pemaknaannya tidak dapat dilepaskan dari konteks manajemen risiko yang dihadapi oleh industri perbankan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kinerja keuangan suatu bank, profil risiko (*Risk Profile*) menjadi hal yang krusial. Profil risiko ini mencakup berbagai jenis risiko utama, antara lain risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan risiko kredit adalah rasio kredit bermasalah atau NPL.

Perbankan memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan. Kredit merupakan instrumen utama yang digunakan bank dalam mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi, baik untuk individu, pelaku usaha, maupun sektor produktif lainnya. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015), kredit adalah penyediaan sejumlah dana berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman, di mana pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Namun demikian, dalam praktiknya, pemberian kredit tidak terlepas dari risiko gagal bayar oleh debitur. Kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan sesuai jadwal yang telah ditentukan dapat menimbulkan kredit bermasalah atau NPL. Rabbani & Rahadian (2022), NPL terjadi ketika debitur tidak dapat melunasi pinjaman sebagaimana mestinya, dan hal ini berpotensi mengganggu stabilitas keuangan bank. Tingginya rasio NPL dapat mengakibatkan penurunan kualitas aset bank, melemahkan profitabilitas, serta menimbulkan kerugian usaha, mengingat salah satu sumber utama pendapatan bank berasal dari bunga kredit (Barus & Erick, 2017).

Stabilitas sektor perbankan memegang peranan penting sebagai fondasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di antara berbagai indikator kesehatan industri perbankan, NPL merupakan salah satu tolok ukur

utama yang mencerminkan kualitas aset serta kemampuan lembaga keuangan dalam mengelola risiko. Peningkatan rasio NPL tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam manajemen kredit, tetapi juga dapat mengindikasikan adanya tekanan di sektor riil serta potensi kerentanan dalam sistem keuangan, terutama pada level daerah.



Gambar 1.2 Non Performing Loan Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan Tahun 2015-2024

Berdasarkan Gambar 1.2, perkembangan NPL pada BPD di wilayah Kalimantan selama periode 2015 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang berbeda-beda di tiap provinsi. Analisis ini penting sebagai indikator kesehatan lembaga keuangan daerah serta efektivitas manajemen risiko dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19

Tingkat NPL BPD Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan yang relatif moderat. Dari angka 0,56 persen pada tahun 2015, rasio ini mengalami kenaikan secara bertahap hingga mencapai 1,84 persen pada tahun 2024. Puncak tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 1,91 persen. Meskipun terjadi peningkatan, rasio NPL di Kalimantan Barat masih berada jauh di bawah ambang batas toleransi sebesar 5 persen sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini mencerminkan pengelolaan kredit yang cukup hati-hati dan pengendalian risiko yang masih dalam batas wajar.

Berbeda dengan Kalimantan Barat, tren NPL di Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan yang lebih signifikan. Rasio NPL meningkat dari 0,47 persen pada tahun 2015 menjadi 2,69 persen pada tahun 2024. Peningkatan tajam terjadi terutama setelah tahun 2021, yang dapat mengindikasikan adanya tekanan struktural terhadap kualitas aset perbankan. Tren ini perlu mendapat perhatian serius mengingat tingginya laju pertumbuhan NPL dapat berdampak pada stabilitas keuangan daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap BPD sebagai lembaga intermediasi.

BPD Kalimantan Selatan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengelola rasio NPL. Selama satu dekade terakhir, NPL BPD di provinsi ini cenderung tinggi dan fluktuatif, bahkan sempat mencapai 5,65 persen pada tahun 2017, yang berarti melampaui ambang batas risiko yang ditetapkan regulator. Meskipun terdapat upaya penurunan hingga 3,10 persen pada tahun 2022, rasio NPL kembali naik menjadi 4,54 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan risiko kredit dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor ekonomi yang mendominasi penyaluran kredit.

Sementara itu, BPD di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memperlihatkan tren NPL yang lebih stabil. Rasio NPL mengalami kenaikan secara bertahap dari 1,64 persen pada tahun 2015 menjadi 3,21 persen pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 2,25 persen pada tahun 2024. Penurunan dalam dua tahun terakhir mencerminkan adanya proses pemulihan dan peningkatan manajemen kualitas aset setelah terjadinya tekanan ekonomi akibat pandemi. Meskipun demikian, tetap diperlukan langkah-langkah preventif untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah dinamika sektor pertambangan dan energi yang menjadi ciri khas wilayah ini.

Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi dan tekanan terhadap kualitas aset, BPD dituntut untuk menjaga stabilitas kinerja keuangannya. Salah satu langkah krusial adalah mempertahankan kualitas aset melalui manajemen risiko kredit yang efektif, agar rasio NPL tetap berada dalam batas aman. Dalam konteks ini, analisis terhadap hubungan antara NPL dan ROE menjadi penting guna memahami sejauh mana risiko kredit berdampak pada penurunan profitabilitas bank daerah.

NPL sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Semakin rendah tingkat NPL, semakin kecil pula risiko kredit yang harus ditanggung (Yatna & Anugrah, 2019). Ghosh (2015) menyebutkan bahwa buruknya kualitas kredit, tingginya biaya inefisiensi, serta skala industri perbankan dapat secara signifikan meningkatkan tingkat NPL. Sebaliknya, bank dengan skala yang lebih besar dan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat NPL yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk melakukan evaluasi secara cermat terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebelum memutuskan pemberian kredit.

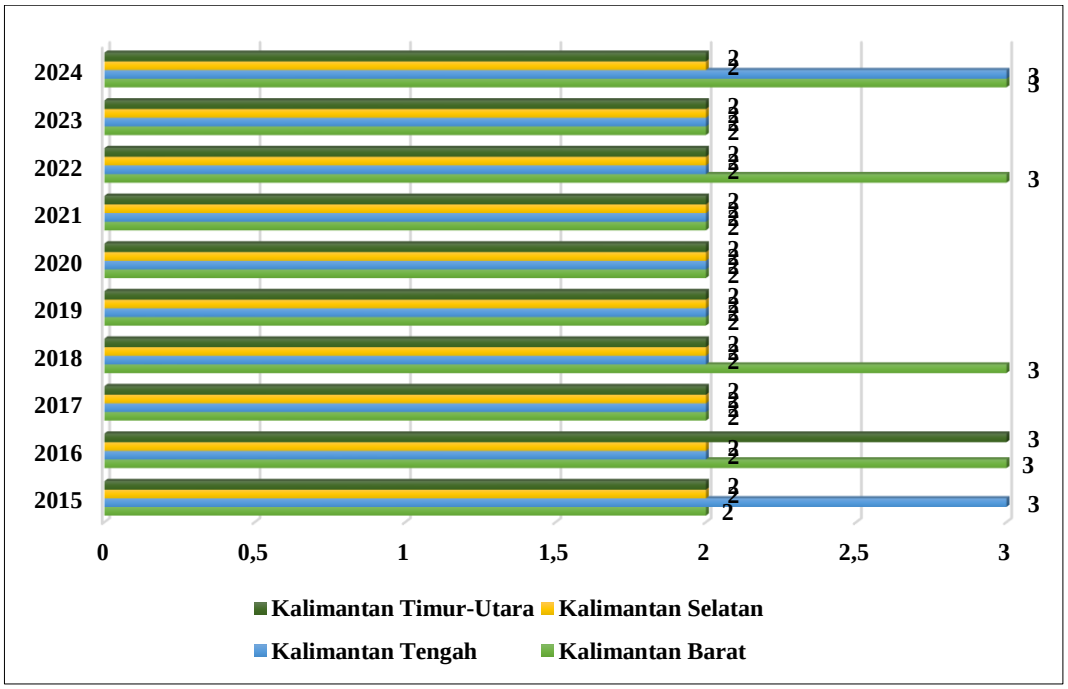
Dalam industri perbankan, risiko kredit merupakan salah satu tantangan utama yang dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas dan stabilitas keuangan. Namun demikian, selain risiko kredit, aspek tata kelola perusahaan atau GCG juga memainkan peran yang tidak kalah penting dalam memengaruhi kinerja keuangan bank. Penerapan GCG yang efektif diyakini dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga mampu meminimalkan potensi risiko yang berujung pada penurunan profitabilitas, termasuk risiko kredit yang tinggi.

Secara umum, GCG merupakan sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan tujuan utama menciptakan kinerja dan keberlanjutan organisasi secara optimal (Ulfa dkk., 2025). Penilaian terhadap penerapan GCG dalam sektor perbankan biasanya dilakukan melalui tiga komponen utama, yaitu struktur tata kelola (governance structure), proses tata kelola (governance process), dan hasil tata kelola (governance outcome). Di Indonesia, penerapan GCG dalam dunia perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang menetapkan lima prinsip utama, yakni keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), profesionalisme (professionalism), dan kewajaran (fairness).

GCG berperan penting sebagai mekanisme pengaturan dan pengendalian internal yang bertujuan menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Seog, 2011). Penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten telah terbukti mampu meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan, sedangkan lemahnya implementasi GCG dapat

menimbulkan berbagai permasalahan, seperti memburuknya kondisi keuangan hingga meningkatnya risiko terjadinya financial distress (Putri dkk., 2018). Lebih lanjut, GCG juga berfungsi untuk membatasi tindakan manajerial yang bersifat oportunistik, serta memperkuat akuntabilitas dan integritas dalam proses pengambilan keputusan (Yun, 2011).

Dalam konteks BPD, penerapan prinsip-prinsip GCG memiliki urgensi tersendiri. Hal ini disebabkan oleh struktur kepemilikan BPD yang mayoritas dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga rentan terhadap intervensi politik dan lemahnya profesionalisme manajerial. Oleh karena itu, GCG menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas, efisiensi, serta daya saing BPD sebagai institusi keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal.



Gambar 1.3 Good Corporate Governance (GCG) Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Kalimantan Tahun 2015-2024

Berdasarkan Gambar 1.3, data skor penilaian GCG periode 2015 hingga 2024 di wilayah Kalimantan, terlihat dinamika yang mencerminkan beragam tingkat kepatuhan dan efektivitas tata kelola di masing-masing provinsi. Skor GCG BPD Kalimantan Barat selama satu dekade terakhir menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif, yakni berada pada rentang skor 2 hingga 3. Nilai 3 tercatat pada tahun 2016, 2018, 2022, dan 2024, sementara tahun lainnya menunjukkan skor

2. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik belum sepenuhnya konsisten dan masih menghadapi tantangan, baik dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengawasan internal, maupun kualitas pengambilan keputusan strategis. Ketidakstabilan ini dapat menjadi refleksi dari lemahnya budaya tata kelola di internal lembaga serta perlunya penguatan sistem manajemen risiko dan kepatuhan.

Berbeda dengan Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Tengah memperlihatkan skor yang relatif stabil, dengan skor 2 secara konsisten dari tahun 2016 hingga 2023. Meskipun sempat memperoleh skor 3 pada tahun 2015 dan kembali pada 2024, secara umum tren ini menunjukkan adanya tata kelola yang cukup baik dan berkesinambungan. Namun, kenaikan skor di tahun terakhir patut dicermati sebagai sinyal akan potensi penurunan kualitas tata kelola, yang mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan internal, dinamika organisasi, atau tantangan eksternal yang belum terkelola secara optimal.

BPD Kalimantan Selatan menunjukkan performa paling konsisten dalam hal penerapan GCG, dengan skor 2 yang bertahan secara stabil selama sepuluh tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik, mencerminkan adanya kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi yang mendukung kepatuhan, serta pengawasan internal yang berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Konsistensi ini menjadikan BPD Kalimantan Selatan sebagai contoh praktik tata kelola yang baik di antara BPD wilayah Kalimantan lainnya.

BPD di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (yang dalam data tergabung sebagai satu entitas) juga menunjukkan skor GCG yang relatif stabil dengan skor 2 dari tahun 2015 hingga 2024, kecuali pada tahun 2016 ketika sempat naik menjadi skor 3. Skor tersebut menunjukkan bahwa secara umum praktik tata kelola berada pada level yang baik, meskipun terdapat indikasi gangguan atau kelemahan temporer pada tahun 2016 yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Stabilitas skor 2 pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa perbaikan telah dilakukan secara efektif.

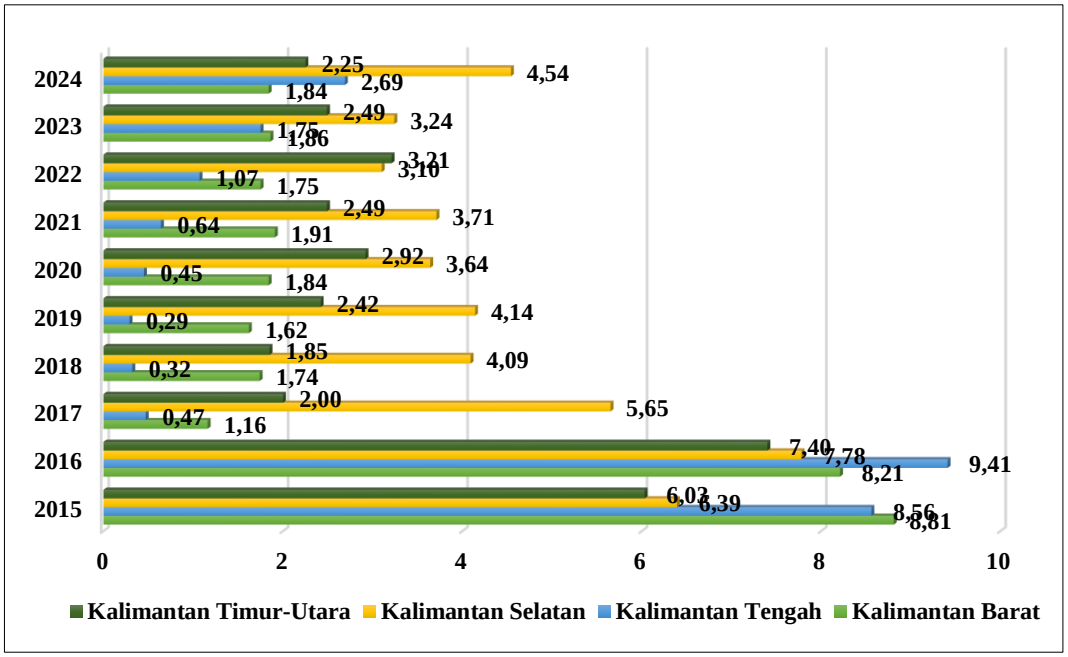
Secara umum, BPD Kalimantan Selatan dapat dikategorikan sebagai entitas dengan penerapan GCG terbaik dan paling konsisten di wilayah Kalimantan. Kalimantan Timur-Utara dan Kalimantan Tengah juga menunjukkan tingkat

kestabilan yang baik, sementara Kalimantan Barat memerlukan perhatian lebih terkait konsistensi implementasi tata kelola. Variasi skor di antara wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi, sistem pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta kualitas SDM.

Kondisi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun penerapan GCG pada BPD di Kalimantan tergolong cukup baik, namun tantangan dalam hal konsistensi, peningkatan kualitas, dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis masih perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas implementasi GCG di lingkungan BPD, khususnya dalam kaitannya dengan risiko kredit dan kinerja keuangan. Penelitian ini menjadi relevan sebagai upaya untuk mendorong penguatan tata kelola perusahaan yang adaptif dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dan ketahanan BPD sebagai agen pembangunan daerah di era desentralisasi fiskal.

Dalam konteks industri perbankan, penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi sangat krusial untuk mendorong peningkatan kinerja dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, perhatian terhadap faktor-faktor internal yang memengaruhi profitabilitas, khususnya pada bank pembangunan daerah, perlu menjadi fokus utama dalam upaya optimalisasi kinerja keuangan. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja bank adalah NIM. NIM merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan aset produktif rata-rata yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan (Akbar & Rizqi, 2025).

Rasio ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator profitabilitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan eksposur bank terhadap risiko pasar yang muncul akibat fluktuasi kondisi eksternal. Semakin tinggi nilai NIM, semakin besar kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aktivitas intermediasi keuangan yang dijalankan (Aryaningsih, 2018). Oleh karena itu, NIM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Return on Equity (ROE), yang merupakan salah satu ukuran utama keberhasilan manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan.



Gambar 1.4 Net Interest Margin (NIM) Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan Tahun 2015-2024

Berdasarkan Gambar 1.4, Net Interest Margin (NIM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) di wilayah Kalimantan selama periode 2015 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang berbeda di masing-masing provinsi, yang mencerminkan kondisi manajerial, struktur pembiayaan, serta tantangan eksternal yang dihadapi oleh masing-masing entitas perbankan daerah.

Pada awal periode analisis, BPD Kalimantan Barat mencatat NIM yang relatif tinggi, yaitu sebesar 8,81 persen pada tahun 2015, dan sedikit menurun menjadi 8,21 persen pada 2016. Namun, mulai tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat signifikan hingga ke level 1,16 persen, dan sejak saat itu NIM cenderung stagnan pada kisaran 1,6 persen hingga 1,9 persen sampai tahun 2024.

Penurunan tajam pasca-2016 ini dapat mengindikasikan adanya penyesuaian strategis dalam struktur pembiayaan, peningkatan biaya dana (cost of fund), atau penurunan pendapatan bunga akibat restrukturisasi kredit. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset produktif dan evaluasi terhadap kebijakan intermediasi yang diterapkan oleh BPD Kalimantan Barat.

BPD Kalimantan Tengah menunjukkan fluktuasi NIM yang cukup ekstrem. Setelah mencatat angka yang tinggi pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing

sebesar 8,56 persen dan 9,41 persen, NIM kemudian turun drastis menjadi 0,47 persen pada tahun 2017. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir terlihat tren perbaikan yang cukup signifikan, dengan NIM meningkat secara bertahap hingga mencapai 2,69 persen pada tahun 2024.

Fluktuasi tajam ini menunjukkan adanya dinamika struktural yang cukup kompleks, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan dalam komposisi portofolio kredit, efisiensi operasional, serta pengelolaan risiko. Pemulihan bertahap dalam NIM mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja intermediasi dan penguatan kelembagaan di internal BPD Kalimantan Tengah.

Berbeda dengan daerah lainnya, BPD Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten. Setelah mencapai NIM sebesar 6,39 persen pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan hingga 7,78 persen pada 2016, NIM sempat menurun namun tetap berada pada level yang kompetitif, yaitu pada kisaran 3,1 persen hingga 4,5 persen dalam rentang 2018 hingga 2024. Pada tahun 2024, NIM tercatat sebesar 4,54 persen, yang merupakan yang tertinggi di antara seluruh BPD Kalimantan.

Stabilitas ini mencerminkan kemampuan BPD Kalimantan Selatan dalam mengelola portofolio aset secara efisien, serta menunjukkan bahwa bank tersebut mampu mempertahankan margin bunga bersih di tengah dinamika pasar yang kompetitif. Hal ini juga mengindikasikan adanya struktur kredit yang relatif sehat dan didukung oleh efisiensi operasional yang cukup baik.

NIM BPD Kalimantan Timur-Utara juga menunjukkan penurunan dari 6,03 persen pada tahun 2015 menjadi sekitar 1,85 persen pada tahun 2018. Dalam beberapa tahun selanjutnya, NIM sempat membaik menjadi 3,21 persen pada 2022, namun kembali menurun ke level 2,25 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tekanan profitabilitas yang bersumber dari peningkatan biaya dana, perubahan profil risiko debitur, atau penyesuaian terhadap ketentuan regulasi perbankan. Kinerja yang relatif tidak stabil ini mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap kebijakan pembiayaan, strategi ekspansi kredit, serta penguatan manajemen risiko yang berkelanjutan.

Dari keempat wilayah, BPD Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja NIM yang paling stabil dan kompetitif, yang dapat dijadikan rujukan dalam

pengembangan strategi intermediasi yang berkelanjutan. Sementara itu, BPD Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur-Utara menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas margin bunga bersih, yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Di sisi lain, tren pemulihan yang terjadi di Kalimantan Tengah mengindikasikan adanya ruang untuk penguatan kelembagaan dan efisiensi pembiayaan.

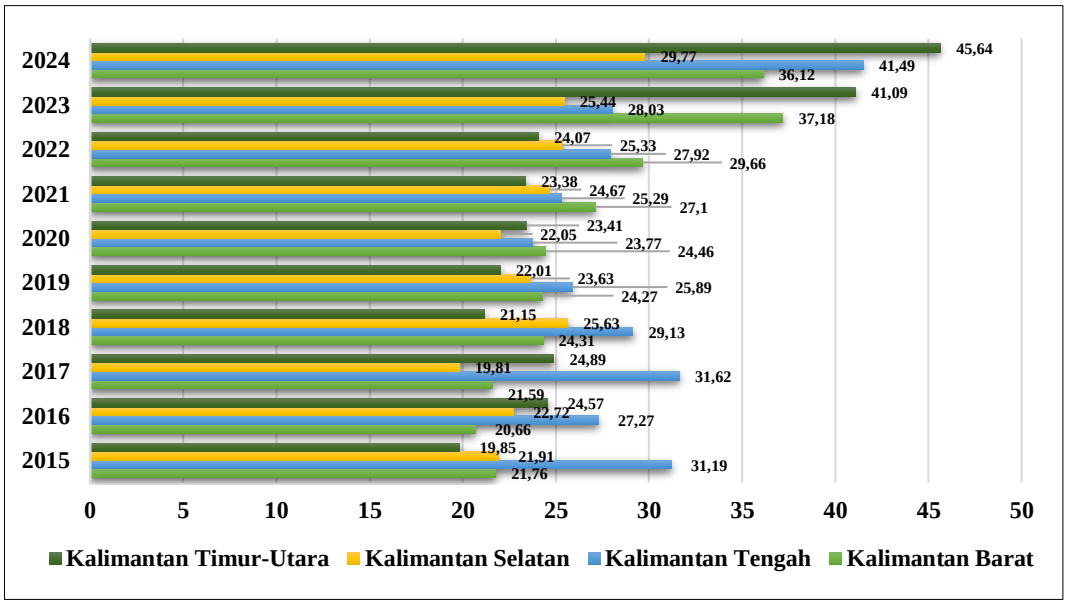
Mengingat pentingnya NIM sebagai indikator kinerja yang dipengaruhi oleh kebijakan manajerial dan implementasi GCG, maka pengambilan keputusan keuangan yang tepat, relevan, dan strategis menjadi kunci dalam memaksimalkan nilai perusahaan serta kekayaan pemegang saham (Fikriyah & Mustaqim, 2024). Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi NIM dan profitabilitas bank sangat diperlukan sebagai dasar dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan dan tata kelola yang efektif.

Selain NIM yang mencerminkan efisiensi pendapatan bunga bersih terhadap aset produktif, aspek lain yang tidak kalah penting dalam menilai kesehatan dan stabilitas keuangan bank adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR merupakan indikator yang mengukur kemampuan bank dalam menanggung risiko kredit dan operasional melalui kecukupan modal yang dimiliki. Rasio ini menjadi salah satu parameter utama dalam menjaga kelangsungan usaha perbankan dan menjaga kepercayaan nasabah. Dalam konteks kinerja keuangan bank secara menyeluruh, NIM dan CAR saling melengkapi; di mana peningkatan profitabilitas harus sejalan dengan kecukupan modal agar bank tetap tangguh menghadapi berbagai risiko yang melekat pada aktivitas intermediasi keuangan.

Menurut Nursinta dkk. (2025) CAR mencerminkan sejauh mana bank mampu menanggung potensi kerugian dari aset yang memiliki risiko. Semakin baik manajemen bank dalam mengelola risiko kredit berbasis aset tertimbang menurut risiko, maka semakin tinggi pula nilai CAR yang dicapai. Dalam pandangan Asnawi dkk. (2025), CAR juga merupakan tolok ukur utama yang mencerminkan kekuatan ekuitas dalam mendukung aktivitas bank, khususnya aktiva produktif yang berisiko. Oleh karena itu, semakin besar nilai CAR, semakin baik pula tingkat kesehatan bank secara finansial.

Rosanti & Siregar (2020) menyatakan bahwa CAR merupakan indikator utama dalam menilai kondisi finansial bank, khususnya dalam menghadapi risiko dari kredit bermasalah. CAR yang tinggi mencerminkan kemampuan bank untuk menyerap potensi kerugian, sekaligus menurunkan risiko peningkatan NPL. Bank yang memiliki buffer modal yang kuat akan lebih resilien dalam menghadapi gejolak ekonomi dan dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan lebih optimal (Yasmir dkk., 2024).

Secara normatif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas minimum CAR untuk bank umum sebesar 8 persen. Namun, dalam praktiknya, rasio yang ideal berada pada kisaran 12 persen hingga 24 persen, tergantung pada profil risiko masing-masing bank. CAR yang terlalu rendah mengindikasikan kelemahan dalam struktur permodalan, sedangkan CAR yang terlalu tinggi dapat mencerminkan pemanfaatan modal yang kurang optimal, sehingga perlu dicermati secara komprehensif.



Gambar 1.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan Tahun 2015-2024

Berdasarkan Gambar 1.5, batas minimal Capital Adequacy Ratio (CAR) yang wajib dipenuhi bank di Indonesia adalah 8 persen. Nilai CAR yang tinggi mencerminkan struktur permodalan yang kuat, yang pada gilirannya menunjukkan resiliensi bank terhadap potensi kerugian. Pada periode 2015 hingga 2024, CAR Bank Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Pada

tahun 2015, rasio CAR tercatat sebesar 21,76 persen dan mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 36,12 persen pada tahun 2024, dengan puncaknya terjadi pada 2023 sebesar 37,18 persen. Kenaikan ini menunjukkan penguatan modal yang konsisten, yang kemungkinan didorong oleh akumulasi laba ditahan dan strategi permodalan yang konservatif. Kestabilan ini mencerminkan manajemen risiko yang relatif prudent, serta kemampuan institusi dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi aset dan kecukupan modal.

CAR Bank Kalimantan Tengah menunjukkan pola fluktuatif. Pada awal periode (2015), rasio CAR cukup tinggi, yakni 31,19 persen. Namun, tren ini mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2020 sebesar 23,77 persen. Penurunan tersebut dapat diasumsikan sebagai akibat dari ekspansi kredit yang tidak diimbangi oleh peningkatan modal yang memadai. Kendati demikian, dalam tiga tahun terakhir, terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 41,49 persen pada 2024. Kenaikan tajam ini mengindikasikan adanya penguatan struktur permodalan, yang bisa berasal dari penambahan modal inti maupun peningkatan efisiensi operasional.

Sepanjang periode pengamatan, CAR Bank Kalimantan Selatan tergolong stabil dan moderat. Pada tahun 2015, CAR tercatat sebesar 21,91 persen dan terus mengalami pertumbuhan yang relatif bertahap hingga mencapai 29,77 persen pada 2024. Pola ini mencerminkan strategi pengelolaan risiko dan permodalan yang hati-hati. Meskipun pertumbuhannya tidak secepat bank BPD lainnya, konsistensi tersebut dapat dianggap sebagai cerminan dari kebijakan ekspansi kredit yang sejalan dengan kemampuan permodalan.

Bank Kalimantan Timur-Utara (Kaltimtara) mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam rasio CAR-nya. Pada tahun 2015, CAR berada pada posisi paling rendah dibandingkan ketiga BPD lainnya, yakni 19,85 persen. Namun demikian, mulai tahun 2021 hingga 2024, terjadi lonjakan yang sangat tajam, hingga mencapai 45,64 persen pada 2024. Kenaikan drastis ini dapat mencerminkan adanya restrukturisasi modal besar-besaran atau peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Meskipun demikian, tingginya CAR secara ekstrem juga perlu dicermati, karena dapat mengindikasikan rendahnya pemanfaatan modal untuk ekspansi kredit secara optimal.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2024, terjadi kesenjangan yang signifikan antara bank dengan CAR tertinggi dan terendah. Pada 2024, Bank Kaltimtara mencatat CAR tertinggi sebesar 45,64 persen, sedangkan Bank Kalsel berada pada posisi terendah dengan 29,77 persen. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya perbedaan strategi manajemen risiko dan kebijakan permodalan antar-BPD di wilayah Kalimantan.

Tingginya CAR, terutama yang melebihi 35 persen, meskipun mencerminkan kekuatan modal, juga dapat menunjukkan belum optimalnya penyaluran kredit dan fungsi intermediasi perbankan. Oleh karena itu, ke depan, tantangan utama bagi BPD bukan hanya menjaga stabilitas modal, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan modal tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkualitas.

Mengingat peran strategis BPD sebagai motor penggerak ekonomi daerah, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangannya menjadi sangat krusial. Variabel-variabel seperti Risk Profile, GCG, Earnings, dan Capital merupakan komponen utama dalam kerangka penilaian kesehatan bank yang ditetapkan oleh otoritas pengawas perbankan. Dinamika yang terjadi pada indikator-indikator tersebut, khususnya di wilayah Kalimantan, menunjukkan adanya variasi yang mencerminkan perbedaan kebijakan manajerial dan tantangan ekonomi masing-masing daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji secara empiris pengaruh dari keempat aspek tersebut terhadap kinerja keuangan BPD di Kalimantan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan manajemen BPD dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan peran BPD dalam pembangunan ekonomi regional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui fungsi intermediasi keuangan, penyediaan layanan publik, serta penyaluran kredit produktif bagi sektor-sektor unggulan daerah. Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks,

tekanan efisiensi operasional, dan tuntutan tata kelola yang transparan, pengukuran kinerja keuangan BPD menjadi isu yang krusial.

Salah satu kerangka evaluasi kinerja yang digunakan oleh regulator adalah pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*), yang menilai kesehatan bank secara komprehensif. Namun, di wilayah Kalimantan, BPD dihadapkan pada berbagai tantangan khas, antara lain rendahnya penetrasi pasar, struktur ekonomi daerah yang heterogen, serta dampak pandemi yang memengaruhi stabilitas keuangan dan kebutuhan akan penguatan tata kelola.

Meskipun RGEC merupakan pendekatan standar dalam industri perbankan, penelitian empiris yang menguji pengaruh masing-masing komponen RGEC terhadap kinerja keuangan BPD secara terintegrasi dalam konteks Kalimantan masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman yang lebih dalam terhadap faktor-faktor determinan kinerja keuangan ini sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis bagi penguatan peran BPD dalam pembangunan daerah.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan?
3. Apakah *Net Interest Margin* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Net Interest Margin* terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur terkait penilaian kinerja keuangan perbankan dengan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*), khususnya dalam konteks BPD di wilayah Kalimantan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai determinan kinerja keuangan bank daerah yang selama ini masih relatif terbatas. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam pengembangan model evaluasi kinerja bank berbasis karakteristik regional.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi manajemen BPD di Kalimantan dalam meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan mengetahui pengaruh signifikan dari masing-masing komponen RGEC terhadap kinerja keuangan, BPD dapat merancang kebijakan internal yang lebih tepat sasaran, seperti optimalisasi manajemen risiko, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan modal. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham untuk mengevaluasi dan mengarahkan peran BPD secara lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.